

## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara**

#### A. Direktur Utama Radio Republik Indonesia

1. Mengapa perlunya ada perubahan status dari Radio Republik Indonesia?
2. Apakah kelemahan RRI ketika menjadi PERJAN, hingga perlu diubah menjadi LPP?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan RRI harus berubah?
4. Bagaimana cara RRI memperjuangkan perubahan yang diinginkan?
5. Apakah target dari perubahan RRI?
6. Apakah peran ibu dalam perubahan tersebut?
7. Bagaimana cara RRI menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut?
8. Secara teknis, bagaimana perubahan berlangsung dalam tubuh RRI?
9. Apakah ada kelemahan strategi yang direncanakan RRI untuk mencapai target perubahan? Atau hambatan dalam melaksanakan strategi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan?
10. Adakah cara yang ditempuh dalam menghadapi hambatan dalam perubahan? Apa saja strategi yang kemudian muncul dalam menghadapi hambatan tersebut?
11. Apakah SDM dari RRI bisa ikut menyesuaikan diri dengan adanya perubahan ini?
12. Apakah ada pembinaan secara khusus terhadap SDM dari RRI?
13. Jika saat menjadi PERJAN RRI berada di bawah menteri penerangan, bagaimana status RRI pada saat menjadi LPP dan bertanggung jawab kepada siapa?

14. Bagaimana hubungan dengan masyarakat? Apakah ada perubahan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sebelum dan sesudah berubah menjadi LPP?  
Bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dengan masyarakat sekarang ini?
15. Adakah proses evaluasi secara rutin dalam perubahan RRI untuk mengetahui sejauh mana hasil yang sudah di dapatkan?
16. Seberapa jauh Seberapa jauh hasil yang telah dicapai RRI setelah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik?

B. Direktur Program dan Produksi

1. Apa tujuan dari berdirinya Lembaga Penyiaran Publik?
2. Jika dilihat dari internal RRI sendiri, apakah RRI siap melakukan perubahan?
3. Bagaimana *Management of Change* dalam tubuh RRI?
4. Perubahan apa saja yang telah dilakukan RRI dalam penyesuaian diri dengan perubahan?
5. Bagaimana cara RRI merubah citra yang semula corong pemerintah, dan kini menjadi radio milik publik?
6. Bagaimana cara hubungan RRI dengan masyarakat setelah menjadi LPP, mengingat LPP adalah Lembaga Penyiaran Publik yang melayani Publik?
7. Apakah ada perubahan dengan konten siaran?
8. Bagaimana perubahan pola penyiaran pada RRI sejak menjadi LPP?
9. Adakah perubahan budaya dalam organisasi dalam menghadapi perubahan?
10. Apa peran pemimpin RRI dalam menghadapi perubahan ini?

11. Setelah berubah menjadi LPP apakah RRI sudah bisa mencapai target yang telah dirancang saat merumuskan perubahan?
12. Adakah kendala dalam menyesuaikan dengan perubahan? Bagaimana cara RRI menghadapi kendala tersebut?
13. Hingga saat ini samapai dimana pencapaian RRI, jika merujuk kembali kepada target perubahan yang telah direncanakan?

C. Kepala Sub Bagian SDM Radio Republik Indonesia satasiun Yogyakarta.

1. Mengapa RRI perlu berubah status dari PERJAN menjadi LPP?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan RRI harus berubah?
3. Apakah target dari perubahan RRI?
4. Bagaimana strategi RRI dalam menghadapi perubahan?
5. Apakah tujuan dari perubahan tersebut benar-benar dilaksanakan?
6. Apakah ada hambatan dalam mengimplemantasikan strategi dalam menghadapi perubahan? Bagaimana cara RRI untuk menghadapi tantangan terhadap perubahan?
7. Bagaimana cara RRI memperjuangkan perubahan yang diinginkan?
8. Bagaimana cara RRI menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut?
9. Apakah perubahan tersebut benar-benar dilaksanakan?
10. Apakah peran RRI Stasiun Yogyakarta dalam perubahan tersebut?
11. Bagaimana cara RRI stasiun Yogyakarta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan?
12. Seberapa jauh hasil yang telah dicapai RRI setelah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik?

13. Hingga saat ini samapai dimana pencapaian RRI, jika merujuk kembali kepada target perubahan yang telah direncanakan?





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

## Profil

Lembaga Penyiaran Publik

**Radio Republik Indonesia**





Radio Republik Indonesia (RRI) lahir 11 September 1945 adalah satu-satunya lembaga penyiaran yang menyanggah nama negara. Mengemban tugas yaitu: memberikan pelayanan informasi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).







RRI memiliki 77 cabang terdiri atas: 67 Stasiun Penyiaran Tipe A, B, dan C, dan 10 Studio Produksi di perbatasan, 11 perwakilan di luar negeri, 21 kontributor di 21 negara yang memiliki *citizen service*, dan satu saluran siaran Luar Negeri-VOI (Voice of Indonesia) dengan 8 bahasa (7 bahasa asing dan 1 bahasa Indonesia).



Masing-masing stasiun RRI memiliki minimal 3 program (Program 1, 2, 3) dan 15 stasiun diantaranya memiliki 4 program. Artinya, RRI setara dengan 214 radio di Indonesia. Seluruh olah siaran RRI didukung oleh sekitar 7.760 SDM, baik PNS maupun non PNS.



## Visi RRI

“Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai radio berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia”



### Daftar Isi

#### Bagian Perusahaan

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| 02. | Pengantar Direktur Utama |
| 04. | Peran RRI                |
| 08. | Dewan Pengawas LPP-RRI   |
| 10. | Dewan Direksi LPP-RRI    |
| 12. | Capaian RRI              |
| 14. | Programa Siaran          |
| 15. | Jangkauan Siaran         |

#### Program Kegiatan

- |     |  |
|-----|--|
| 16. | Kegiatan Sosial                            |
| 18. | Kegiatan Seni dan Budaya                   |
| 20. | Kegiatan Strategis Lainnya                 |
| 22. | RRI Nafas dan Hati Nurani Bangsa Indonesia |



## Pengantar Direktur Utama LPP-RRI



**Dra. R. Niken Widiastuti, MSi.**

Dengan Hormat,

RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik milik negara yang berjangkauan terluas dengan 77 cabang se-Indonesia dan jangkauan siaran kurang lebih 80% wilayah.

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara, sehingga siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI berfungsi sebagai perekat sosial, pemersatu bangsa, mencerminkan identitas bangsa, merefleksikan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan serta ikut menjaga kedaulatan NKRI.

Dari waktu ke waktu LPP-RRI terus melakukan berbagai langkah guna mewujudkan Visi dan Misi RRI, diantaranya meredesain kembali format program diantaranya Pro 1 menjadi Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat, Pro 2 menjadi Pusat Siaran Kreatifitas Anak Muda, Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan Pro 4 Pusat Siaran Kebudayaan dan Pendidikan. Penataan atau redesain program ini dilakukan untuk memperkuat konten lokal RRI dan menegaskan siaran RRI yang berpihak kepada publik.



RRI sebagai pelestari budaya bangsa juga terus menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh Indonesia secara konsisten baik berupa Festival Penyanyi Lagu Melayu, Bintang Radio, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Golek, Madihin, Saluang dan Budaya-budaya daerah lainnya. Tidak saja yang bersifat siaran *on air*, RRI juga terus melayani kebutuhan publik dalam bentuk kegiatan *off air* baik itu berupa acara musik, tari, seni kreatifitas melalui kegiatan Pekan Kreatif dan layanan-layanan masyarakat.

RRI juga terus meningkatkan peranannya sebagai Media Diplomasi Lini Kedua (Second Track Diplomacy) dalam bentuk siaran "Diplomatic Forum" di VOI. Siaran ini bertujuan untuk membangun citra positif bangsa di dunia Internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat resiprokal. RRI melalui VOI juga menyiarkan berita dari dunia Internasional ke Indonesia melalui 11 perwakilan RRI di luar negeri dengan kontributor yang sangat beragam.

RRI juga selalu mengambil peran sebagai media terdepan dalam tanggap bencana, seperti RRI menyelenggarakan siaran langsung dari Tenda Darurat baik waktu kejadian Tsunami di Aceh, Gempa di Sumatra Barat, meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta dan kejadian-kejadian bencana lainnya di Indonesia.

Kedepan LPP-RRI akan terus menjadi Radio Publik, memenuhi kebutuhan keinginan publik dan mengundang seluruh masyarakat tidak hanya mendengar RRI tapi juga berbicara, menyampaikan aspirasi melalui RRI, jadikan RRI radio rakyat Indonesia untuk menjembatani berbagai kalangan. Semboyan sekali di udara tetap di udara.

Jakarta, September 2011



Dra. R. Niken Widiastuti, MSi.  
Direktur Utama LPP-RRI.





## Peran RRI

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip Lembaga Penyiaran Publik, dalam menyelenggarakan siaran RRI berpedoman pada standar nilai penyiaran:

- Siaran bersifat independen dan netral.
- Siaran memberi pemahaman.
- Siaran mengurangi ketidakpastian.
- Siaran berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan kebenaran, serta peraturan negara yang lainnya.
- Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI.

**siaran Luar**





### **Peran RRI sebagai Pemberdayaan Masyarakat:**

RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat disemua lapisan melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup, kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil, dll.



### **Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa:**

Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh Indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.



### **Peran RRI sebagai Media Pendidikan:**

RRI menyelenggarakan Siaran Pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja seperti Lomba Cipta Lagu, Lomba Cipta Desain, Lomba IT, Lomba Band Indie, Pemilihan Bintang Radio, Pekan Tilawatul Quran dan Cerdas Cermat. Juga menyelenggarakan siaran Pendidikan Sosial Masyarakat, seperti; Siaran Wanita, Siaran Pedesaan, Siaran Keluarga Berencana, dll.



### Peran RRI sebagai Media Diplomasi:

RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa di dunia Internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat resiprokal, kerjasama siaran dengan ABC, NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jeddah, Radio Turki, RCI, DW, dll.



### Peran RRI sebagai Media Terdepan Tanggap Bencana:

RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui *Radio Based Disaster Management*. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih 24 jam, RRI sudah melaporkan, kemudian diikuti pelaksanaan program Pelipur Lara berupa hiburan bagi korban bencana dan *Trauma Healing* dengan mendirikan studio darurat.



### Peran RRI dalam menghubungkan Tenaga Kerja di Luar Negeri:

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu; Hongkong, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman.

Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar melalui *audio streaming*. Program ini digelar rutin setiap hari Minggu melalui program 3 dan bersifat *live*.





### Peran RRI dalam Sabuk Pengaman Informasi (Safety Belt Information):

Selama tahun 2009 s.d 2011, RRI telah mendirikan 16 studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau *blankspot* yaitu: Entikong, Batam, Nunukan, Putusibau, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang, Aceh Singkil, Sendawar, dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau *blankspot*.



### Peran RRI Kelompok Pemerhati RRI:

RRI adalah lembaga Penyiaran Publik yang mendapat dukungan dari masyarakat. Masing-masing RRI mempunyai Kelompok Pemerhati yang jumlahnya antara 1000 s/d 10.000 anggota. Kelompok Pemerhati membentuk Forum Komunikasi Pemerhati RRI yang kepengurusan ada di tingkat daerah dan pusat. Kelompok Pemerhati tidak sekedar pendengar tetapi mereka juga memberikan masukan pada perencanaan siaran dan ikut memberikan evaluasi siaran dan tak jarang mereka mengusahakan dana untuk penyelenggaraan siaran yang melibatkan publik.





## Dewan Pengawas LPP-RRI



④

①

②

③

⑤

### 1. Drs. H. ZULHAQQI HAFIF, MM (Ketua Dewan Pengawas)

Mengawali karir di RRI sejak berusia 24 tahun dan terus mengabdikan sepanjang 36 tahun dengan perjalanan karir sebagai Kepala RRI Tanjung Pinang, Kepala RRI Bandung dan Kepala RRI Jakarta. Sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP-RRI, Kepala Pusat Pemberitaan LPP-RRI dan sebagai Kepala Puslitbangdiklat LPP-RRI sebelum akhirnya dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas LPP-RRI Periode 2010-2015. Organisasi yang pernah diikuti aktif sebagai pengurus inti PWI Cabang Lampung, Ikatan Penulis KB, pengurus level Propinsi Lampung pada DPD Golkar, KONI, GNOTA. Kegiatan lainnya aktif sebagai dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan sebagai pengelola sebuah sekolah tinggi di Bandar Lampung. Moto: hari ini lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini.



---

## 2. Dra. DWI HERNUNINGSIH, MSi (Anggota)

Mengawali karirnya sebagai reporter wanita kelahiran Klaten 16 Agustus 1961 ini merupakan seseorang yang sampai sekarang mengabdikan kepada LPP-RRI dari tahun 1983. Banyak pendidikan informal yang beliau dapatkan sebagai kemampuan dibidang jurnalistik, seperti pernah mengikuti Diklat Wartawan UGM, Diklat Kehumasan dan Protokol, Diklat Pemberitaan dan banyak diklat serupa lainnya. Beliau juga memiliki segudang pengalaman organisasi dibidang *Broadcasting* dan Jurnalistik. Banyak jabatan yang telah diraih selama pengabdianya terhadap dunia pemberitaan. Salah satunya pernah menjabat sebagai Kepala RRI Bogor, Senior Manager Divisi Pemberitaan RRI Surabaya dan pengalaman lainnya. Sehingga saat ini beliau dipercaya untuk menjadi Dewan Pengawas di LPP RRI.

---

## 3. I.B ALIT WIRATMAJA, SH (Anggota)

Menulis dan *traveling* menjadi hobi yang tidak pernah ditinggalkan diwaktu lowong bagi ayah dari dua putra dan lahir di Bali ini. Aktif sebagai wartawan sejak tahun 1979 di Bali dan terus mengembangkan karir kewartawanan dan manajemen hingga sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro LKBN Antara di Canberra Australia, sebagai Direksi Antara di Jakarta, sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Antara hingga akhirnya terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas LPP-RRI Periode 2010-2015. Pernah aktif di Organisasi Sosial Politik dan Pendiri sebuah Yayasan Pendidikan di Denpasar. Hingga saat ini masih terus aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar di dalam dan di luar negeri tentang Jurnalisme dan Bisnis Media. Pernah duduk sebagai Board of Director Consortium berbagai Kantor Berita Asing seperti dalam wadah Consortium AsiaNet dan AsiaPulse. Bekerja dengan semangat dan yakin untuk mencapai tujuan secara *on the track*.

---

## 4. Ir. SUNARYA RUSLAN, MSEE (Anggota)

Anggota Dewan Pengawas LPP-RRI Periode 2010-2015 ini lahir di Cianjur Jawa Barat, menyelesaikan sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti dan S2 bidang Electrical & Computer Engineering dari Bradley University, Illinois, USA tahun 1991. Memulai karir Staff Teknik TVRI Pusat, Kabid Teknologi Transmisi, Pusbinsartek RTF, Deppen RI tahun 1993-2002, Kabid Transmisi Perjan RRI tahun 2001-2004, Kepala RRI Malang tahun 2004-2005 dan tahun 2005-2008 dipercaya sebagai Direktur Sumber Daya Teknologi LPP-RRI dan tahun 2008-2010 sebagai Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Diklat LPP-RRI. Kegiatan Organisasi yang pernah diikuti sebagai Wakil Ketua Himpunan Ahli Teknik Penyiaran (HATPI) dan anggota Mastel, pernah aktif sebagai Anggota Panitia/Tim Nasional Migrasi Analog-Digital, Depkominfo dan Nara Sumber Ditjen Postel. Kegiatan Internasional yang pernah diikuti sebagai Anggota Technical Bureau Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) dan Anggota Dewan Juri ABU Engineering Industry Excellence Award.

---

## 5. TIAS ANGGORO, ST (Anggota)

Pria kelahiran Semarang, 13 Nopember 1973 ini adalah sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Indonesia yang memulai bekerja sebagai penyiar karena hobi pada sebuah radio swasta ketika masih SMA di Makassar. Karirnya kemudian berlanjut dengan bekerja di beberapa radio swasta di Jakarta, antara lain sebagai Executive Producer di radio Elshinta hingga 2005 dan National Station Manager di radio Trijaya hingga 2007. Sampai saat ini Tias dikenal sebagai pembicara, trainer dan konsultan dalam bidang radio di dalam dan luar negeri. Tias yang hobi membaca dan berprinsip belajar tanpa mengenal umur, juga tercatat sebagai salah satu pendiri dan ketua Umum Aliansi Wartawan Radio Indonesia periode 2010-2013.





## Dewan Direksi LPP-RRI



**Dra. R. Niken Widiastuti, MSi.**  
Direktur utama

Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Utama LPP-RRI adalah Alumni S1-S2 Fisipol UGM yang membangun "Super Team" RRI. Memulai karir sebagai penyiar, penulis naskah, Pengarah Acara, Presenter, Produser di RRI Yogyakarta dan peneliti khususnya penelitian yang berkaitan dengan media dan *Broadcasting*, pernah menjadi Kepala Program Siaran, Kepala LPP-RRI Cirebon, Direktur Program dan Produksi LPP-RRI (2005-2009), Direktur Administrasi dan Keuangan (Mei 2009 - Oktober 2010), Ketua Tim Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2005. Ikut merintis siaran Studio Produksi di perbatasan, mendirikan perwakilan RRI Luar Negeri, terpilih sebagai Vice Chair Person, Programme Committee Asia Pacific Broadcasting Union (2008-2012). Dan sekarang sebagai Direktur Utama LPP-RRI (Oktober 2010 – sekarang).



**Masduki, SAg., MSi., MA**  
Direktur Program dan Produksi

Aktif berorganisasi, antara lain menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta 2004-2006, anggota majelis Etika Nasional AJI Indonesia, 2007-2012 dan menulis beberapa buku terkait radio siaran, jurnanisme, kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran di Indonesia. Aktif juga di dunia NGO, sebagai wakil ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media dan Wakil Ketua Masyarakat Peduli Media Yogyakarta. Sejak 2010, bergabung dengan Radio Republik Indonesia dan diberikan amanah selaku Direktur Program dan Produksi periode 2010-2015.



**Hasto Kuncoro, S.H.**  
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

Memulai karir pada tahun 1988 sebagai reporter pusat pemberitaan RRI, pernah mengikuti liputan haji di Saudi Arabia, dan juga sebagai peliput perang Bosnia Herzegovina. Ayah dari 4 anak yang lahir di Yogyakarta, 1961, menghabiskan masa pendidikannya di Semarang, di RRI, dia pernah berdinasi di 8 kota termasuk sebagai kepala reporter di RRI Yogyakarta, Asisten sekretaris di perusahaan hukum, Senior Manager Pemberitaan di RRI Palembang, senior manager layanan usaha di RRI Jakarta, kepala stasiun RRI Seumenep, Malang, Gorontalo, dan Surabaya. Sebelum terpilih menjadi Direktur Pengembangan layanan usaha dengan bertanggung jawabnya, dia berpegang teguh untuk memperkuat untuk Independent dan netral RRI berdasarkan janji Tri Prasetya. MOTO beliau adalah Yang terbaik bagi manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, mengambil jabatan sebagai mandate atau tugas melalui kerja keras, kemauan dan kerajinan.



Memulai karir di Astra Group hingga mencapai posisi Kepala Cabang, kemudian berkarir dibidang Telekomunikasi dengan jabatan terakhir Regional Manager. Sempat satu tahun bergabung di Indonesia Tower sebuah perusahaan penyedia Infrastruktur Tower dan terakhir di Sinar Mas Telekomunikasi. Penerima Beasiswa Supersemar tahun 1991-1993, menyelesaikan Sarjana Fisika di Universitas Brawijaya dan Master of Business Administration dari Distance Learning Institute, aktif di organisasi mahasiswa sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika dan Senat Universitas Brawijaya. Keindahan Alam, Teknologi, membaca dan sepak bola mejadi hobi yang dilakukan disaat-saat senggang.



**Eric Hermawan, SSI**  
Direktur Teknologi dan Media Baru

Lahir di Jakarta, ayah dari tiga putra ini memulai karir sebagai operator di RRI Jakarta. Selanjutnya dipercaya sebagai Koordinator Kepegawaian Bagian Umum Direktorat Radio, menjadi pimpinan di RRI Malang tahun 2005-2007, kemudian Kepala RRI Lampung selama 3 tahun dan dipromosikan sebagai Kepala RRI Yogyakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi Direktur Keuangan LPP-RRI Periode 2010-2015. Sarjana S1 diperoleh dari STIA LAN RI Jakarta selanjutnya menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Malang, Megister Hukum dan Megister Manajemen di Jakarta. Kerja keras, kerja ikhlas dan mengalir seperti air menjadi motto dalam hidup.



**Drs. Anhar Achmad, SH, MM, MH**  
Direktur Keuangan

Selalu berpikir positif dan bekerja dengan ikhlas menjadi motto dalam keseharian. Memulai karir di Departemen Penerangan Bagian Kepegawaian kemudian menjadi pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Departemen Penerangan. Setelah sempat menjadi Auditor pada Perjan RRI dan menjadi Asisten Kepala SPI, dipercaya menjadi Kepala Bagian Organisasi dan SDM LPP-RRI. Sempat menduduki jabatan sebagai Kepala RRI Samarinda dari tahun 2006-2009, Kepala RRI Malang Tahun 2009-2010 dan Kepala RRI Bandung Tahun 2010, sebelum akhirnya terpilih menjadi Direktur SDM dan Umum LPP-RRI Periode 2010-2015.



**Drs. Dadi Sumihardi**  
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum





## Capaian RRI

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2015 dan merealisasikan misi RRI dengan berlandaskan pada sistim nilai sebagai budaya organisasi yang sudah ditetapkan, maka capaian-capaian dalam pelaksanaan beberapa program atau kegiatan telah dilaksanakan selama ini menjadi rujukan antara lain:

- Pencapaian RRI dalam 5 tahun terakhir yang paling signifikan adalah program sabuk pengaman informasi yang pada awalnya baru berupa siaran suara perbatasan, ditingkatkan dengan membangun Studio Produksi di Entikong, perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia Timur. Studio Produksi yang diwakili hanya oleh sekitar 10 orang ini telah mampu menjadi penyambung lidah antara rakyat di wilayah perbatasan dengan Jakarta dan bagian lain Indonesia dan bahkan dunia. Komisi I DPR RI dan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan TNI memberi apresiasi atas pendirian Studio Produksi. Sejumlah pemerintah daerah telah mengajukan usulan pendirian stasiun RRI, diantaranya Propinsi Banten, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Asmat, Papua dan Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh.
- RRI tidak hanya menjadi jembatan sesama anak bangsa di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri melalui siaran kampung halaman, yang menghubungkan TKI khususnya Nakerwan di luar negeri dan keluarga mereka di tanah air. Program ini telah kita mulai dengan TKI/Nakerwan di Hongkong dan Kuala Lumpur bekerjasama dengan Radio Perantau yang difasilitasi Dompot Dhuafa. RRI juga menjadi Radio terdepan dalam tanggap darurat bencana alam. Hal ini dibuktikan dengan pendirian dan pengelolaan Radio Khusus Darurat Merapi LPP-RRI di Media Center BNPB Jl. Kenari Yogyakarta bekerjasama dengan KPID, BNPB, APJII. Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa, Republika, RRI juga telah mendirikan tenda pelipur lara.
- Dalam mendukung Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011, RRI mengembangkan berbagai program siaran berskala ASEAN dan dunia seperti Diplomatic Forum, setiap sekali dalam sebulan dengan menghadirkan para duta besar negara sahabat, membahas topik terkait kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. RRI juga memiliki program ASEAN in Action berupa liputan kegiatan negara ASEAN melalui Program 3 setiap minggu.
- Persembahan terakhir konduktor maestro RRI almarhum Amir Katamsi.





- Ide RRI untuk menyelenggarakan Bintang Radio Asia-Pasific sudah diadopsi dan diputuskan oleh Strategic Planning Group APU 2010 menjadi Asia Pasific Song Festival. RRI mengambil prakarsa menjadi tuan rumah penyelenggara event Asia Pasific Song Festival tahun 2012. RRI juga akan menjadi tuan rumah konferensi Radio Asia tahun 2012 mendatang.
- RRI terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, yaitu :
  - Asia Pasific Broadcasting Union (ABU), Asia-Pasific Institute for Broadcasting Development (AIBD), Public Services International (PBI) dan berbagai kerjasama Internasional, merupakan modal awal yang baik untuk menjadi RRI berbagai radio berkelas dunia, diantaranya :
    - Penyelenggaraan Sidang Umum ABU di Bali yang dinilai sangat sukses dan belum ada tandingannya oleh sebagian besar anggota ABU.
    - Program Green Radio yang diluncurkan RRI tahun 2009 telah diadopsi menjadi proyek ABU yang dilaksanakan oleh seluruh anggota ABU.
    - Kerjasama RRI dan Tokyo Broadcasting Services dalam pelaksanaan Green Radio/ Sedekah Pohon (Dompot Dhuafa) di Bone, Sulawesi Selatan, Mei 2010.
- Penghargaan-penghargaan yang diterima LPP-RRI :
  - THE ABU PRIZE, Children's & Youth (Radio), Mongolia 2009
  - Reinhard Keune's Memorial Award 2011 for The Best Radio Programme Dealing with Forest Issues. The award is supported by Asia-Pasific Institute For Broadcasting Development (AIBD).
  - Pemegang Terbaik II Anugerah Pesona Wisata Indonesia 2010 Kategori Media Elektronik (Radio), dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Jero Wacik) dengan judul "Dokumenter Kuburan Batu di Lemo Toraja (RRI Jakarta)".
  - Piagam Penghargaan MURI atas Rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Laporan Langsung dengan Reporter Terbanyak, bulan Mei 2011.





## Programa Siaran



**PRO 1**  
Pusat  
Pemberdayaan  
Masyarakat

### Programa 1

Siaran lokal di setiap RRI yang menyajikan beragam acara lokal/tradisional maupun nasional, musik hiburan, dan informasi pendidikan.



**PRO 2**  
Pusat  
Kreativitas  
Anak Muda

### Programa 2

Siaran lokal di kota-kota besar yang menyajikan program kreatifitas anak muda perkotaan, hiburan, informasi dan program musik.



**PRO 3**  
Jaringan  
Berita  
Nasional

### Programa 3

Jaringan berita nasional 24 jam dengan materi independen, netral dan tidak komersial.



**PRO 4**  
Pusat  
Kebudayaan  
Indonesia

### Programa 4

Siaran nasional dengan penerimaan gelombang "short wave", menyajikan lokal dan budaya nasional serta program pendidikan.

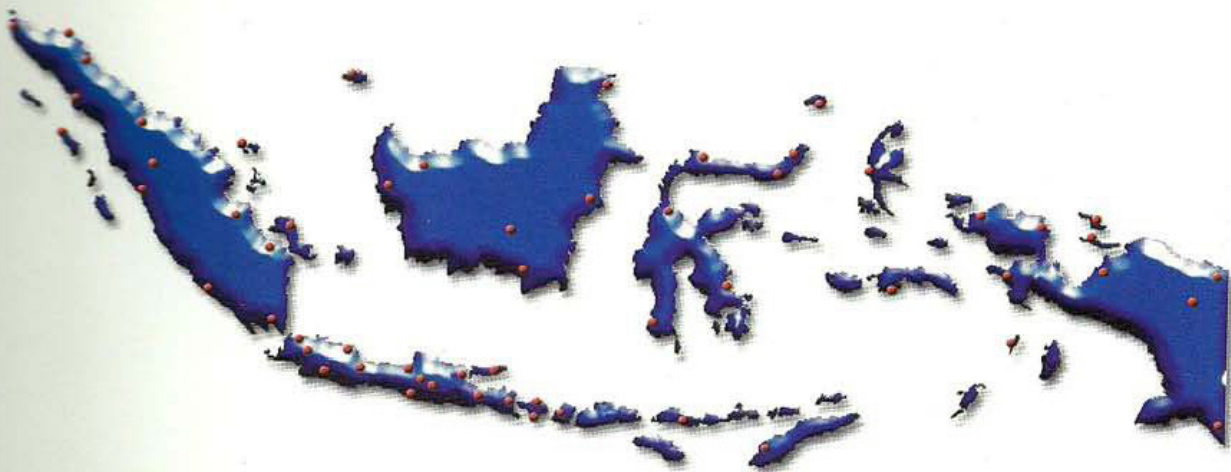


**VOI**  
RRI  
World  
Service

### Voice of Indonesia

Siaran internasional yang menyajikan informasi mengenai Indonesia khusus untuk warga Indonesia di luar negeri dan masyarakat pada umumnya.

## Jangkauan Siaran



### Jakarta PRO 3

#### Medan (Korwil I)

- Sibolga
- Gunung Sitoli
- Banda Aceh
- Lhokseumawe
- Meulaboh
- Batam

#### Palembang (Korwil II)

- Jambi
- Bengkulu
- Bandar Lampung
- Sungai Liat

#### Bandung (Korwil III)

- Bogor
- Cirebon

### Semarang (Korwil IV)

- Purwokerto
- Surakarta

#### Surabaya (Korwil V)

- Madiun
- Malang
- Jember
- Sumenep

#### Banjarmasin (Korwil VI)

- Pontianak
- Samarinda
- Palangkaraya
- Sintang
- Tarakan
- Entikong
- Nunukan

### Makassar (Korwil VII)

- Palu
- Kendari
- Ambon
- Tual

#### Denpasar (Korwil VIII)

- Singaraja
- Mataram
- Kupang
- Ende
- Atambua

#### Jayapura (Korwil IX)

- Meruake
- Biak
- Serui
- Wamena
- Boven Digoel

### Pekanbaru (Korwil X)

- Bukittinggi
- Padang
- Tanjung Pinang
- Ranai (Natuna)

#### Manado (Korwil XI)

- Gorontalo
- Ternate
- Toli Toli
- Tahuna

#### Manokwari (Korwil XII)

- Fak Fak
- Sorong
- Nabire

### Studio Produksi

- Putusibau
- Malinau
- Ampana
- Kaimana
- Skow
- Oksibil
- Takengon
- Sabang
- Aceh Singkil
- Sendawar
- Sampang



Sebagai sebuah Lembaga Penyiaran Publik, RRI selalu berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan melayani kebutuhan publik. Kegiatan dimaksud selain bersifat siaran *on air* juga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan publik dalam bentuk *off air*. Kegiatan Indonesia Berdonor, pelayanan Pengurusan SIM dan STNK Keliling di halaman RRI dan kegiatan yang berkaitan dengan Tanggap Bencana menjadi prioritas yang dilaksanakan RRI. Saat terjadi bencana Tsunami di Aceh, Gempa di Sumatera Barat dan meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio Berbasis Manajemen Bencana. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, RRI harus sudah melaporkan situasi yang disertai dengan Program Pelipur Lara dan *Trauma Healing* dari Studio Darurat.



## Kegiatan Sosial







RRI sebagai pelestari lingkungan, RRI secara rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penghijauan atau Green Radio yang dikerjasamakan dengan pihak-pihak lainnya. Kegiatan Green Radio bersifat *on air* dalam bentuk siaran-siaran dengan berbagai format dan variasi tentang advokasi penghijauan kembali lingkungan dan pengolahan barang-barang bekas. Sedangkan yang bersifat *off air* menyelenggarakan secara langsung penanaman beribu pohon seperti yang dilaksanakan di Gorontalo, Bone, Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya yang dinilai cukup strategis untuk dihijaukan kembali.

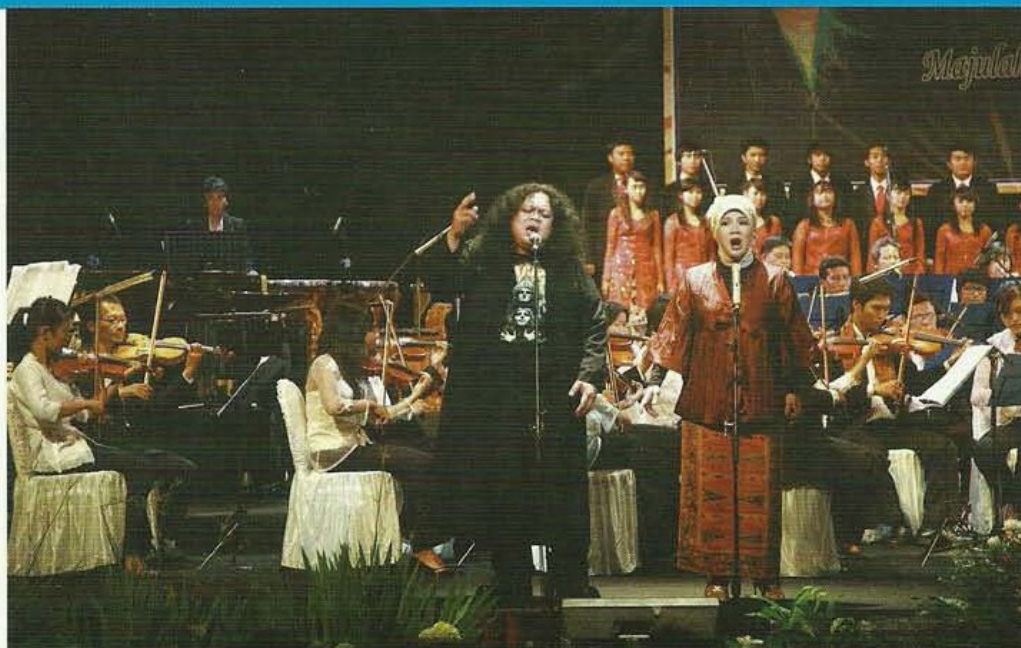




Mendorong agar seni terus berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup dan industri juga terus diupayakan oleh RRI. Pemilihan Bintang Radio yang rutin diselenggarakan setiap tahun, adalah salah satunya yang melahirkan bakat-bakat baru mengisi pentas penyanyi handal di Indonesia. Pemilihan Bintang Radio Tingkat Nasional diawali dari seleksi ditingkat Propinsi dan pada akhirnya terpilih bintang radio tingkat nasional dengan kualitas yang terbaik.



## Kegiatan Seni Budaya







Dalam Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, RRI menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya menyelenggarakan *on air* dan *off air* kesenian tradisional Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Golek, Mahidin, Saluang, Budaya Bugis, Batak dan Budaya-budaya lainnya. Selain itu menyelenggarakan Lomba Lagu Melayu rutin setiap tahun dan diselenggarakan secara nasional menghadirkan utusan dari masing-masing daerah di Indonesia.





Jambore Siaran Nasional (JAMSINAS) adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan RRI dalam rangka mempertemukan seluruh insan radio se-Indonesia untuk saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi untuk kemajuan dunia penyiaran di Indonesia. JAMSINAS selain diikuti oleh angkasawan-angkasawan RRI juga insan radio swasta, organisasi radio, kelompok pemerhati dan komunitas lainnya yang peduli dengan radio di Indonesia. Dalam ajang JAMSINAS digelar berbagai kegiatan baik yang bersifat formal maupun hiburan agar tujuan dari penyelenggaraan JAMSINAS dapat terwujud dengan baik.



## Kegiatan Strategis Lainnya





RRI sebagai radio pemersatu bangsa mengambil peran dalam sabuk pengaman informasi (Informasi Safety Belt). Selama tahun 2009 sampai dengan 2010 RRI telah mendirikan 16 Studio Produksi di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau *blankspot* antara lain di Entikong, Batam, Nunukan, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel dan daerah lainnya. Melalui pembangunan stasiun RRI dan studio RRI di perbatasan NKRI, RRI berkomitmen menjadi alat pertahanan negara di bidang informasi.



Di era konvergensi media, RRI meningkatkan pelayanan informasi melalui Website <http://www.rri.co.id> yang mempunyai kelebihan pelayanan *three in one* yaitu teks, audio dan *video streaming* dengan rubrik yang mencerminkan lembaga penyiaran publik. Masyarakat dapat memperoleh layanan *audio streaming* untuk semua program RRI dan saat ini berbagai informasi tentang RRI juga dapat diakses publik melalui pelayanan informasi



facebook dan twitter. Saat ini salah satu siaran RRI yang sangat strategis adalah Dialog antara Presiden dengan masyarakat melalui acara "Presiden Menyapa" yang diselenggarakan secara rutin melalui siaran berjaringan.





Puisi oleh: Udin Palisuri

# *“RRI, Nafas dan Hati Nurani Bangsa Indonesia”*



Jangan melupakan sejarah

"sekali di udara tetap di udara"

RRI menghias halaman sejarah

Bekerja keras, setia mengabdikan tanpa pamrih

Bergetar sukamu di jantung rakyat

Bernyanyi sanubari mengelus nafas rakyat

Angkasawan RRI sejati, bekerja tanpa mengeluh

Udara jembatan kita, langit titian kita, teknologi alat kita

Hati yang bersih dan tulus kekuatan kita

"Sekali di udara tetap di udara"

Merajut cinta di hati bangsa

Dengan ragam budaya antar nusa

Lulo di Kendari, Topeng Betawi di Jakarta

Pantun Melayu di Pekanbaru, Tari Pendet di Bali

Makan Kaledo di Palu, Pela Gandong di Ambon,

Pakkarena di Makassar, di Tual tertambat cintaku

RRI pemersatu bangsa

RRI tak boleh hilang dari sejarah

RRI sahabat rakyat

RRI serambi budaya tanah air

RRI jiwa kita, nafas kita, kebanggaan kita

Menyulam persaudaraan sejati

Pertahankan nilai moral, pelihara adat dan budaya

Dengan api semangat yang tak bisa mati

Jati diri dan karakter bangsa luhur dan terhormat

Wajah menatap masa depan yang indah

Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Jangan melupakan sejarah

Karena sejarah adalah cermin, sejarah adalah guru

Tingkatkan semangat dan etos kerja

Sebagai bangsa besar yang kuat dan gigih

Maju terus pantang menyerah

RRI nafas dan nurani bangsa Indonesia

"Sekali di udara tetap di udara"

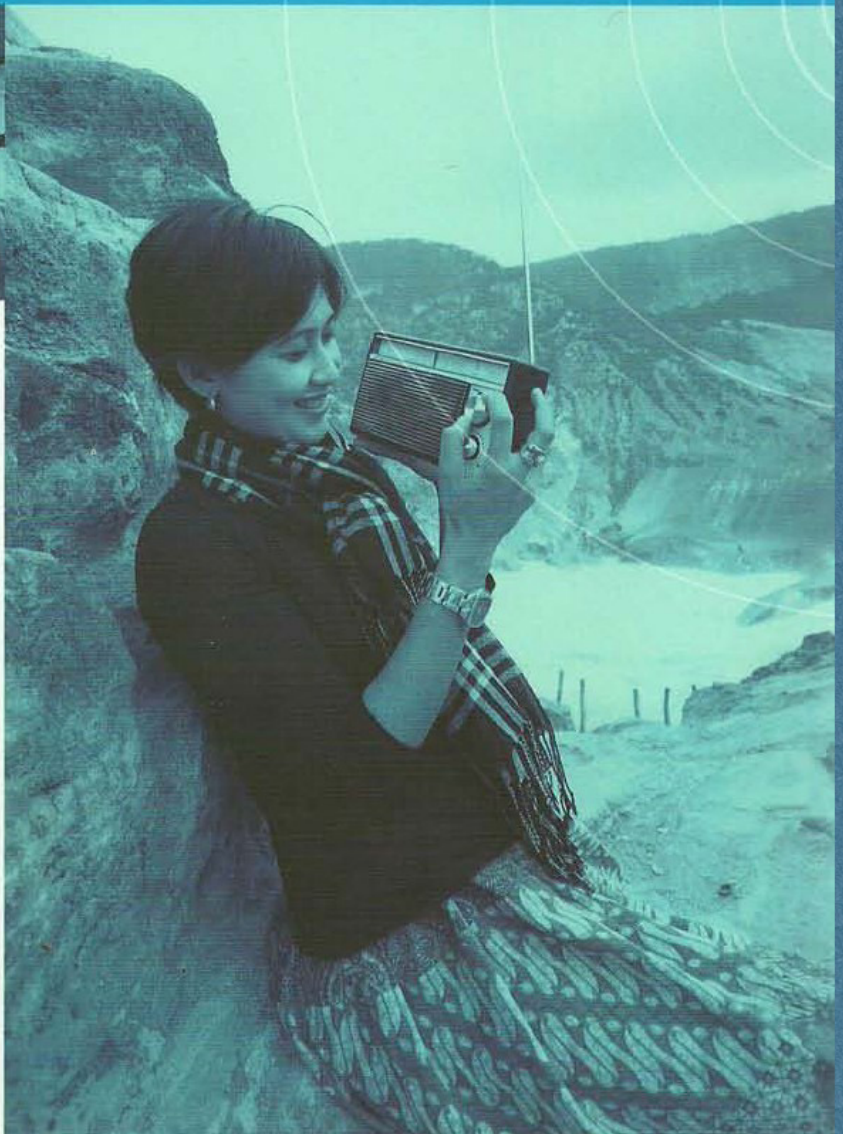








Melayani kepentingan publik, bersifat independen, netral,  
dan tidak komersial







**PRO 1**

Pusat  
Pemberdayaan  
Masyarakat

**PRO 2**

Pusat  
Kreatifitas  
Anak Muda

**PRO 3**

Jaringan  
Berita  
Nasional

**PRO 4**

Pusat  
Kabudayaan  
Indonesia

**VOI**

RRI  
World  
Service

### Radio Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 4 - 5, Jakarta 10110, Indonesia

Tel: +6221-384-9091, 351-1086, Fax: +6221-352-0586



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c) bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;
- Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.



## BAB II

### ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

#### Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

#### Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

#### Bagian Kedua

##### Komisi Penyiaran Indonesia

##### Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

##### Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan standar program siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;



- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
  - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
  - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
  - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
  - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
  - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

#### Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
  - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
  - h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;

- i. bukan pejabat pemerintah; dan
  - j. nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
  - (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
  - (4) Anggota KPI berhenti karena:
    - a. masa jabatan berakhir;
    - b. meninggal dunia;
    - c. mengundurkan diri;
    - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

#### Bagian Ketiga

#### Jasa Penyiaran

#### Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggara-rakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;



- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

#### Bagian Keempat

#### Lembaga Penyiaran Publik

##### Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

##### Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta

### Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

### Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

### Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau



b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

#### Bagian Keenam

#### Lembaga Penyiaran Komunitas

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan :
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh

#### Lembaga Penyiaran Berlangganan

#### Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
  - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
  - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
  - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
  - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
  - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
  - a. iuran berlangganan; dan
  - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;



- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kedelapan

#### Lembaga Penyiaran Asing

#### Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kesembilan

#### Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

#### Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

#### Bagian Kesepuluh

##### Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kesebelas

##### Perizinan

##### Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
  - a.masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
  - b.rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
  - c.hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
  - d.izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

##### Pasal 34



- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
  - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
  - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
  - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
  - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
  - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV  
PELAKSANAAN SIARAN  
Bagian Pertama  
Isi Siaran  
Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu

yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

## Bagian Kedua

### Bahasa Siaran

#### Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

#### Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

## Bagian Ketiga

### Relai dan Siaran Bersama

#### Pasal 40



- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

#### Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

### Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

#### Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Hak Siar

#### Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam

#### Ralat Siaran

#### Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Ketujuh

##### Arsip Siaran

##### Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

##### Siaran Iklan

##### Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.



- (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### Bagian Kesembilan

#### Sensor Isi Siaran

#### Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

### BAB V

#### PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

#### Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
  - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
  - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
  - i. siaran langsung; dan
  - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

#### Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### Pasal 50

- 1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- 2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- 3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- 4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- 5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

#### Pasal 51

- 1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- 2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 52

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 53

- 1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

#### Pasal 54



Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a) teguran tertulis;
  - b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d) denda administratif;
  - e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 56

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

#### Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

#### Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 60

- 1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- 2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- 3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang ber jaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- 1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- 2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

- 1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYIARAN

**UMUM**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besaruntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

Huruf d

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33



Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Ayat (2)

Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 47

Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran.

Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 8263 / 12 / 2013

Membaca Surat : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas  
Negeri Yogyakarta**

Nomor : **2467/UN.34.16/PL/2013**

Tanggal : **02 Desember 2013**

Perihal : **IJIN RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Christina Sitorus**

NIP/NIM : **09417144050**

Alamat : **Karangmalang - Yogyakarta**

Judul :

**MANAGEMENT OF CHANGE PADA RADIO REPUBLIK INDONESIA STASIUN YOGYAKARTA  
DI TENGAH-TENGAH KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Lokasi : **Radio Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta**

Waktu : **03 Desember 2013** s/d **03 Maret 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

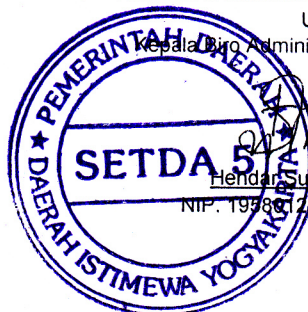
Pada tanggal **03 Desember 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan:**

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Ka. Radio Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta
- 3 Ka. Dishub Kominfo DIY
- 4 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan

Hendang Susilowati, SH.  
NIP. 19580120 198503 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Alamat : Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274)548202, 586168 (psw. 247, 248, 249)

Nomor : 2467 /UN.34.14/PL/2013

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian

02 DEC 2013

Kepada BAPPEDA Prov. DIY  
Kompleks Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta


Dibetahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami **Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan 2009 bermaksud penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Management Of Change pada Radio Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta di Tengah-Tengah Kebijakan Pemerintah*" dengan Dosen pengampu **Yanuardi, M.Si.**

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama dan NIM : Christina Sitorus ( 09417144050 )  
Jurusan/ Prodi. : **Ilmu Administrasi Negara FIS UNY**

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan member izin dan bantuan seperlunya.

Atas perhatian , kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan/Prod.
3. Arsip TU FIS UNY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Alamat : Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274)548202, 586168 (psw. 247, 248, 249)

Nomor : 2534/UN.34.14/PL/2013

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian

09 DEC 2013

Kepada Radio Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5  
Jakarta Pusat

Dibehatuhkan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami **Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan 2009 bermaksud penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Management Of Change pada Radio Republik Indonesia Sejak Berubah Menjadi Lembaga Penyiaran Publik*" dengan Dosen pengampu **Yanuardi, M.Si.**

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama dan NIM : Christina Sitorus ( 09417144050 )  
Jurusan/ Prodi. : **Ilmu Administrasi Negara FIS UNY**

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan member izin dan bantuan seperlunya.

Atas perhatian , kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Dekan,  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan/Prod.
3. Arsip TU FIS UNY



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : ~~849~~ /RRI-Yk/SEK/2013  
Lamp : -  
Perihal : Persetujuan Ijin Riset

Yogyakarta, 10 Desember 2013

Yang terhormat,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
di -  
Yogyakarta

Dengan hormat, menunjuk surat Nomor: 070/Reg/V/8263/12/2013 tanggal 3 Desember 2013 perihal Permohonan Ijin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya RRI Yogyakarta tidak keberatan menerima mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan Ijin Riset atas nama:

Christina Sitorus

NIM. 09417144050

Adapun pelaksanaannya pada:

Mulai tanggal : 12 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014 2013

Jam : 09.00 WIB – selesai

Demikian agar menjadi maklum.



an. Kepala RRI  
ub. Kepala Subbagian SDM,

Adi Suyono, S.I.P., M.M.  
NIP. 19600126 198203 1 003

Tembusan Yth.:  
Kepala RRI Yogyakarta (sebagai laporan)